

Pengaruh SIPD Terhadap Pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan dengan Moderasi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Ende

Fraidi Fadli¹, Laurentius D. Gadi Djou², Imaculata Fatima³

^{1,2,3} Magister Manajemen Universitas Flores

fadlysakharov803@gmail.com, gadidjou67@gmail.com, imaculataf@yahoo.com

ABSTRACT.

This study aims to analyze the influence of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) on regional financial management, the influence of the implementation of the Regional Government Information System on the quality of LKPD, the influence of regional financial management on the quality of LKPD, the influence of the implementation of the Regional Government Information System on the quality of LKPD, analyze the ability of human resource quality in moderating the influence of implementation on regional financial management and analyze the ability of human resource quality in moderating the influence of implementation on the quality of LKPD of the Ende Regency Government. The results of the study indicate that the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) has a positive and significant effect on the quality of regional government financial reports, with a path coefficient value of 0.632, t-statistics of 4.177, and p-value of 0.000, the implementation of SIPD has a positive and significant effect on regional financial management, with a path coefficient value of 0.719, t-statistics of 9.650, and p-value of 0.000, financial management has a positive and significant effect on the quality of regional government financial reports, with a path coefficient value of 0.304, t-statistics of 2.053, and p-value of 0.040, the quality of human resources (KSDM) positively moderates the relationship between the implementation of SIPD and the quality of regional government financial reports (KLKPD). The moderation path coefficient value of 0.204 with t-statistics of 2.120 (p-value 0.034) indicates that the higher the quality of human resources, the stronger the influence of SIPD in improving the quality of regional financial reports, the quality of human resources positively moderates the relationship between SIPD implementation (ISIPD) and regional financial management (PK). The moderation path coefficient value of 0.214 with t-statistics of 3.201 (p-value 0.001) confirms that the better the quality of human resources, financial management acts as a mediating variable that strengthens the relationship between SIPD implementation and the quality of regional government financial reports.

Keywords: SIPD, Financial Management, Financial Reports, Human Resources Quality

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap kualitas LKPD, pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas LKPD, pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap kualitas LKPD, menganalisis kemampuan kualitas SDM dalam memoderasi pengaruh implementasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan menganalisis kemampuan kualitas SDM dalam memoderasi pengaruh implementasi terhadap kualitas LKPD Pemerintah kabupaten Ende. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,632, t-statistics 4,177, dan p-value 0,000, implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,719, t-statistics 9,650, dan p-value 0,000, pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,304, t-statistics 2,053, dan p-value 0,040, kualitas sumber daya manusia (KSDM)

memoderasi secara positif hubungan antara implementasi SIPD dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD). Nilai koefisien jalur moderasi sebesar 0,204 dengan t-statistics 2,120 (p-value 0,034) mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas SDM, semakin kuat pengaruh SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, kualitas SDM memoderasi secara positif hubungan antara implementasi SIPD (ISIPD) dengan pengelolaan keuangan daerah (PK). Nilai koefisien jalur moderasi sebesar 0,214 dengan t-statistics 3,201 (p-value 0,001) menegaskan bahwa semakin baik kualitas SDM, pengelolaan keuangan berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara implementasi SIPD dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: SIPD, Pengelolaan Keuangan, Laporan Keuangan, Kualitas SDM

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*). Hal ini mencakup pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sehingga untuk mengakses informasi mengenai hasil penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dengan mudah oleh para pemangku kepentingan (Arisman, 2018). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Mengacu pada peraturan ini, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, dan efektif. Selain itu, prinsip transparansi dan tanggung jawab juga harus diutamakan, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah alat pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, yang berimplikasi pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah untuk memastikan bahwa Informasi Daerah dapat dikelola secara profesional, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk informasi pembangunan dan keuangan daerah, serta informasi lainnya yang relevan. Manajemen keuangan pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan Tata Manajemen Tata Kelola yang Baik (*good governance government*), yaitu Manajemen Keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan mengenai dimasukkannya manajemen keuangan regional, kegiatan keseluruhan, perencanaan, penganggaran, implementasi, manajemen, pelaporan, tanggung jawab, dan pengawasan keuangan dari wilayah. Di bawah peraturan ini, keuangan lokal harus dikelola dengan cara yang layak, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk memperhatikan prinsip - prinsip keadilan, kesopanan dan layanan kota dan untuk mematuhi ketentuan legislatif. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu perangkat penting yang mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, dan dapat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Tujuan pengelolaan SIPD adalah untuk memastikan bahwa Pengelolaan Informasi Daerah dilakukan secara profesional yakni pengelolaan SIPD wajib menjalankan seluruh proses pengelolaan data perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pelaporan daerah secara akurat, transparan, tepat waktu, dan sesuai regulasi. Hal ini mencakup kompetensi individu, kepatuhan terhadap standar, serta etika dalam menggunakan sistem nasional yang dikelola Kemendagri, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014, di mana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi mengenai Pemerintahan Daerah (termasuk informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah) beserta kemampuan untuk menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Tabel 1.1 Realisasi Penyampaian LKPD Tahun Anggaran 2024 Oleh SKPD Ke BPKAD Kabupaten Ende

No	Jadwal Penyampaian LKPD T.A. 2024	Jumlah SKPD yang Menyampaikan
1	Sesuai Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Nomor BU.900/BPKAD.63/1041/X/2024, Tananggal 17 Oktober 2024 bahwa batas akhir penyampaian LKPD Tahun 2024 oleh SKPD adalah Tanggal 31 Januari 2025	5 SKPD
2	Diperpanjang menjadi Tanggal 31 Maret 2025	9 SKPD
3	Diperpanjang menjadi Tanggal 15 April 2025 sekaligus menjadi Deadline terakhir.	18 SKPD

Sumber: BPKAD Kabupaten Ende, 2025

Penerapan SIPD adalah inisiatif untuk menyempurnakan manajemen keuangan daerah yang sebelumnya menghadapi berbagai masalah, seperti ketidakakuratan dalam anggaran, keterlambatan dalam laporan, serta rendahnya akurasi dan transparansi informasi. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki value untuk mewujudkan output laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan akuntabilitasnya baik, sehingga diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang unggul.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah platform yang menyatukan berbagai aspek penting, seperti perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (Nasution & Nurwani, 2021). SIPD berperan sebagai jaringan yang memfasilitasi pengumpulan data secara akurat dan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ini mendukung perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan efisien. Dengan menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, kita melihat salah satu wujud pemanfaatan teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat manajemen keuangan yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah.

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

IFRS merujuk pada standar akuntansi internasional yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). Kerangka kerja IASB menguraikan tujuan laporan keuangan, sebuah konsep yang ditegaskan kembali dalam Standar Akuntansi Internasional (IAS) No. 1, yang menyatakan bahwa "tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan wawasan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang berharga bagi beragam kelompok pengguna dalam membuat pilihan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan

mencerminkan hasil dari bagaimana manajemen telah menangani sumber daya yang dipercayakan kepada mereka." Menurut Halim dalam Yuliani (2016), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah laporan keuangan pemerintah daerah meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai dari laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini dipilih karena berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan peneliti untuk meneliti populasi atau sampel, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan. Populasi dari penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ende. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *judgement sampling*, sampel diambil sebanyak 2 orang masing-masing OPD yaitu Kepala OPD selaku pengguna anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berjumlah 64 orang.

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner, sedangkan pengolahan data menggunakan Software smartPLS SEM (*Partial Least Square-Structural Equation Modeling*). Metode analisis data meliputi analisa outer model, analisa inner model, pengujian hipotesis dan Analisis Jalur (*Path Analysis*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

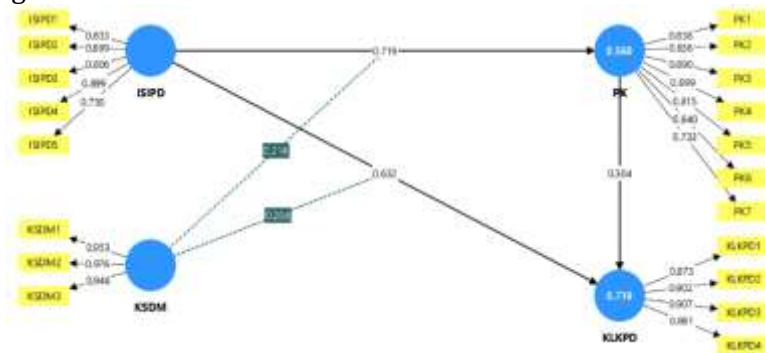
Tabel 1.2 Hasil Uji Outer Loading

	ISIPD	KLKPD	KSDM	PK
ISIPD1	0,833			
ISIPD2	0,899			
ISIPD3	0,806			
ISIPD4	0,899			
ISIPD5	0,730			
KLKPD1		0,873		
KLKPD2		0,902		
KLKPD3		0,907		
KLKPD4		0,861		
KSDM1			0,953	
KSDM2			0,976	
KSDM3			0,946	
PK1				0,838
PK2				0,838
PK3				0,890
PK4				0,899
PK5				0,815

PK6				0,840
PK7				0,733

Sumber: Output Smart PLS, 2025

Berdasarkan hasil analisis outer loading, seluruh indikator pada konstruk ISIPD, KLKPD, KSDM, dan PK menunjukkan nilai di atas 0,70 sehingga dapat dikatakan valid dalam merefleksikan konstruknya masing-masing. Pada konstruk ISIPD, semua indikator memiliki nilai antara 0,730 hingga 0,899, dengan ISIPD5 yang berada pada nilai terendah namun masih dalam kategori layak. Konstruk KLKPD memiliki indikator dengan nilai sangat tinggi, berkisar antara 0,861 hingga 0,907, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk ini terukur dengan baik. Sementara itu, konstruk KSDM menunjukkan konsistensi indikator yang sangat kuat dengan nilai di atas 0,94, menegaskan reliabilitas yang sangat tinggi. Adapun konstruk PK memiliki nilai loading antara 0,733 hingga 0,899, di mana seluruh indikator tetap memenuhi kriteria validitas konvergen.



Gambar 1. 1 Output Smart PLS Outer Loading

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah model pengukuran dianggap memenuhi standar validitas dan reliabilitas, langkah berikutnya dalam analisis PLS-SEM adalah penilaian terhadap model struktural (*inner model*). Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengevaluasi pentingnya serta kekuatan hubungan sebab akibat antara konstruk laten berdasarkan hipotesis yang diajukan

Tabel 1.3. Hasil Uji Multikolinearitas *Inner Model*

	VIF
ISIPD -> KLKPD	2,275
ISIPD -> PK	1,102
KSDM -> KLKPD	1,112
KSDM -> PK	1,073
KSDM x ISIPD -> KLKPD	1,170
KSDM x ISIPD -> PK	1,049
PK -> KLKPD	2,270

Sumber: Output Smart PLS, 2025

Berdasarkan hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF), seluruh nilai VIF dalam model berada di bawah ambang batas 5, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel. Nilai VIF tertinggi terdapat

pada hubungan ISIPD → KLKPD (2,275) dan PK → KLKPD (2,270), namun keduanya masih jauh di bawah batas toleransi sehingga tetap aman. Sementara itu, hubungan ISIPD → PK (1,102), KSDM → KLKPD (1,112), KSDM → PK (1,073), serta efek interaksi KSDM x ISIPD terhadap KLKPD (1,170) dan terhadap PK (1,049) menunjukkan nilai VIF yang sangat rendah, menandakan tidak adanya gejala multikolinearitas yang signifikan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa model penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas dan dapat dilanjutkan pada tahap pengujian struktural (inner model).

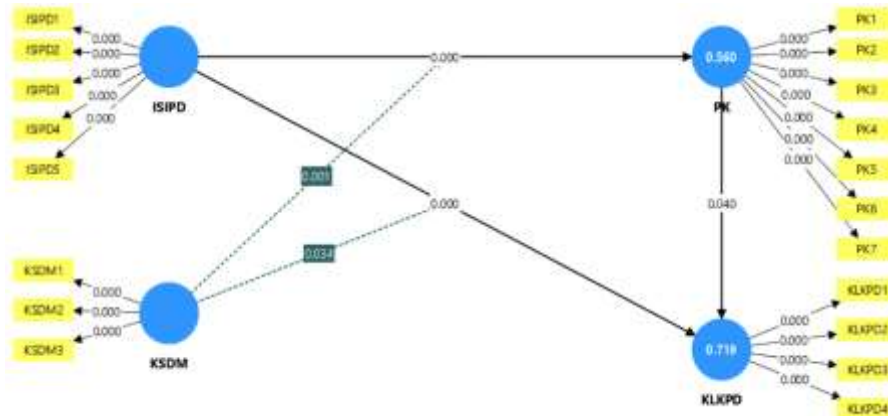
Uji Signifikansi Jalur Path (*Path Coefficients*)

Tabel 1.4 Hasil Uji Path Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
ISIPD -> KLKPD	0,632	0,642	0,151	Hasil Uji Path Coefficients 4,177	0,000
ISIPD -> PK	0,719	0,726	0,074	9,650	0,000
PK -> KLKPD	0,304	0,296	0,148	2,053	0,040
KSDM x ISIPD -> KLKPD	0,204	0,204	0,096	2,120	0,034
KSDM x ISIPD -> PK	0,214	0,219	0,067	3,201	0,001

Sumber: Output Smart PLS, 2025

Visualisasi hasil pengujian *path coefficients* pada smartPLS versi 4 dapat digambarkan:



Gambar 1. 2 Output Smart PLS Outer Loading

Berdasarkan tabel hasil uji *path coefficients* di atas dapat dijelaskan:

1. ISIPD → KLKPD
Jalur ini memiliki koefisien sebesar 0,632 dengan nilai T-statistics 4,177 dan p-value 0,000, sehingga pengaruhnya dapat dinyatakan positif dan signifikan. Artinya, semakin baik implementasi ISIPD, maka semakin tinggi pula KLKPD.
2. ISIPD → PK
Hasil menunjukkan koefisien sebesar 0,719 dengan T-statistics 9,650 dan p-value 0,000. Hal ini menegaskan bahwa pengaruh ISIPD terhadap PK sangat

kuat, positif, dan signifikan, sehingga ISIPD berperan penting dalam meningkatkan PK.

3. PK → KLKPD

Hubungan ini memiliki koefisien sebesar 0,304, T-statistics 2,053, dan p-value 0,040, yang berarti pengaruhnya positif dan signifikan, meskipun tidak sekuat jalur lain. Dengan demikian, peningkatan PK dapat mendorong kenaikan KLKPD.

4. KSDM x ISIPD → KLKPD

Hasil uji menunjukkan koefisien 0,204, T-statistics 2,120, dan p-value 0,034, sehingga efek moderasi KSDM pada hubungan ISIPD terhadap KLKPD bersifat positif dan signifikan. Hal ini berarti KSDM memperkuat pengaruh ISIPD terhadap KLKPD.

5. KSDM x ISIPD → PK

Jalur ini memiliki koefisien 0,214 dengan T-statistics 3,201 dan p-value 0,001, sehingga juga positif dan signifikan. Artinya, KSDM terbukti memperkuat pengaruh ISIPD terhadap PK.

Analisis Efek Mediasi (*Indirect Effect*)

Tabel 1.5 Hasil Uji Mediasi

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
ISIPD -> PK -> KLKPD	0,219	0,215	0,110	1,988	0,047

Sumber: Output Smart PLS, 2025

Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa jalur ISIPD → PK → KLKPD memiliki koefisien original sample sebesar 0,219 dengan T-statistics 1,988 dan p-value 0,047. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh mediasi positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PK berperan sebagai mediator dalam hubungan antara ISIPD terhadap KLKPD. Artinya, selain ISIPD berpengaruh langsung terhadap KLKPD, pengaruh tersebut juga diperkuat melalui peningkatan PK.

Pembahasan

Hubungan ISIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,632, t-statistics 4,177, dan p-value 0,000. Hal ini berarti semakin baik penerapan SIPD dalam proses pengelolaan keuangan daerah, maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, baik dari sisi akurasi, transparansi, maupun ketepatan waktu penyajian.

Secara teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui teori sistem informasi akuntansi yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi terintegrasi akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta reliabilitas laporan keuangan pemerintah (Romney & Steinbart, 2018). SIPD sebagai aplikasi resmi pemerintah pusat dirancang untuk menyatukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga memperkecil potensi kesalahan manual sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi Fitriasari (2024) yang menemukan bahwa implementasi SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Bandung. Temuan serupa ditunjukkan oleh penelitian di Provinsi Jambi, yang menegaskan bahwa pemanfaatan SIPD memperkuat keterandalan laporan keuangan karena data yang dihasilkan lebih terintegrasi dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Hubungan SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,719, t-statistics 9,650, dan p-value 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan SIPD di lingkungan pemerintah daerah, maka semakin efektif pula proses pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan.

Dalam konteks Kabupaten Ende, penerapan SIPD terbukti memudahkan OPD melakukan perencanaan anggaran, realisasi belanja, pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sistem ini memungkinkan adanya konsistensi data antar-OPD serta mempercepat proses validasi anggaran. Walaupun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan jaringan dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, implementasi SIPD telah memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian lain yang menunjukkan hasil berbeda. Rachmawati (2022), misalnya, mengungkapkan bahwa meskipun sistem informasi telah tersedia, kualitas pengelolaan keuangan tidak serta-merta meningkat apabila tidak ada dukungan memadai dari sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Dalam beberapa kasus, pengelolaan keuangan justru mengalami hambatan karena operator belum terbiasa dengan sistem baru atau karena keterbatasan jaringan internet.

Hubungan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,304, t-statistics 2,053, dan p-value 0,040. Artinya, semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah, maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Walaupun nilai pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya, hasil ini tetap menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan memiliki kontribusi yang berarti dalam meningkatkan akurasi, transparansi, serta akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Namun, terdapat penelitian yang tidak sepenuhnya mendukung hasil ini. Misalnya, studi oleh Rachmawati (2022) menemukan bahwa meskipun pengelolaan keuangan dilakukan dengan prosedur formal, kualitas laporan keuangan belum tentu optimal apabila tidak ada komitmen organisasi dan pengawasan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan saja tidak cukup, melainkan harus ditopang oleh pengendalian internal yang kuat dan integritas aparatur yang tinggi.

Dalam konteks Kabupaten Ende, hasil penelitian ini mencerminkan kondisi di mana peningkatan kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan OPD. Melalui SIPD, pemerintah daerah mampu

meningkatkan efektivitas dalam pencatatan dan pelaporan, namun faktor manajerial dan kepatuhan regulasi tetap menjadi kunci keberhasilan. Dengan kata lain, keberhasilan laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kedisiplinan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2023) yang menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dan sesuai standar berdampak positif pada kualitas laporan keuangan. Fitriasari (2024) juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel berperan penting dalam menciptakan laporan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Moderasi Sumber Daya Manusia Dalam Hubungan Implementasi SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (KSDM) memoderasi secara positif hubungan antara implementasi SIPD (ISIPD) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD). Nilai koefisien jalur moderasi sebesar 0,204 dengan t-statistics 2,120 (p-value 0,034) mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas SDM, semakin kuat pengaruh SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Ende, OPD dengan SDM yang lebih kompeten terbukti mampu memanfaatkan SIPD secara optimal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebaliknya, di OPD dengan keterbatasan kapasitas aparatur, masih ditemui kendala input data, keterlambatan laporan, dan inkonsistensi pencatatan. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM menjadi syarat penting agar SIPD benar-benar dapat berkontribusi pada kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Fitriasari (2024) yang menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dalam mengelola SIPD. Begitu pula studi Hidayat (2023) menunjukkan bahwa pelatihan SDM berperan penting dalam memperkuat kualitas laporan keuangan berbasis SIPD. Namun, penelitian Rachmawati (2022) menunjukkan hasil berbeda, di mana meskipun SDM telah mengikuti pelatihan, keterbatasan pemahaman dan adaptasi aparatur menyebabkan implementasi SIPD tidak serta-merta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan SDM memerlukan waktu, konsistensi, serta dukungan kelembagaan.

Moderasi Sumber Daya Manusia Dalam Hubungan Implementasi SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas SDM memoderasi secara positif hubungan antara implementasi SIPD (ISIPD) dengan pengelolaan keuangan daerah (PK). Nilai koefisien jalur moderasi sebesar 0,214 dengan t-statistics 3,201 (p-value 0,001) menegaskan bahwa semakin baik kualitas SDM, semakin optimal pula pengaruh SIPD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Ende, peran SDM terlihat jelas dalam membedakan efektivitas implementasi SIPD antar-OPD. OPD dengan aparatur yang terlatih dan terbiasa menggunakan SIPD cenderung lebih efektif dalam melakukan perencanaan anggaran, realisasi belanja, serta pelaporan pertanggungjawaban. Sebaliknya, OPD

yang masih terkendala kapasitas SDM sering mengalami keterlambatan dan kesalahan input yang berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM merupakan faktor krusial untuk memperkuat peran SIPD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Penelitian ini konsisten dengan temuan Hidayat (2023) yang mengungkapkan bahwa kompetensi SDM memperkuat peran SIPD dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Fitriasari (2024) juga menyatakan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan mampu memaksimalkan manfaat SIPD dalam pengelolaan keuangan. Namun, studi Rachmawati (2022) menunjukkan bahwa kendala kualitas SDM, terutama terkait literasi digital dan manajerial, dapat menghambat pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, tanpa dukungan SDM yang kompeten, SIPD berpotensi hanya menjadi alat administratif tanpa kontribusi nyata terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

Mediasi Pengelolaan keuangan Dalam Hubungan Implementasi SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan (PK) berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara implementasi SIPD (ISIPD) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD). Nilai koefisien jalur sebesar 0,219 dengan t-statistics 1,988 dan p-value 0,047 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung ISIPD terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengelolaan keuangan adalah signifikan. Hal ini berarti SIPD tidak hanya berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas tersebut secara tidak langsung melalui perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Ende, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan melalui SIPD menjadi mekanisme penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui SIPD, proses penyusunan anggaran, realisasi belanja, hingga pelaporan lebih sistematis, transparan, dan sesuai regulasi. Walaupun masih ada tantangan berupa keterbatasan SDM dan infrastruktur, SIPD tetap terbukti berperan ganda, baik secara langsung maupun melalui mediasi pengelolaan keuangan, dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi Hidayat (2023) yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang baik mampu menjembatani pengaruh sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Fitriasari (2024) juga menegaskan bahwa SIPD berkontribusi pada kualitas laporan keuangan melalui perbaikan proses pengelolaan keuangan, khususnya dalam aspek transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, terdapat penelitian yang tidak sejalan, seperti yang ditunjukkan oleh Rachmawati (2022), bahwa meskipun sistem informasi dan praktik pengelolaan keuangan telah dijalankan, kualitas laporan keuangan tidak serta-merta meningkat apabila terdapat kelemahan pada aspek integritas aparatur atau lemahnya pengawasan internal. Temuan ini mengingatkan bahwa efektivitas SIPD dan pengelolaan keuangan tetap bergantung pada komitmen organisasi dan budaya tata kelola yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada 32 OPD di Kabupaten Ende, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan (PK). Artinya, SIPD mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
2. Implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SIPD, semakin meningkat akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan.
3. Pengelolaan keuangan (PK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik pengelolaan keuangan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
4. Implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan (PK). Artinya, SIPD mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
5. Kualitas sumber daya manusia (KSDM) memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan pengelolaan keuangan. Semakin baik kualitas SDM, semakin optimal pengaruh SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
6. Kualitas sumber daya manusia (KSDM) memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, kontribusi SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan akan lebih kuat jika ditunjang oleh SDM yang kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150-164.
- Aldino, H. P., Annisa, A., & Zulvia, D. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Internal Audit, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2), 116-126.
- Amalia, M., & Suwondo, S. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: (Survei pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 78-89.
- Antalthoniq, M. A. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Semarang) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Dwirini, D. (2023). Modernisasi Teknologi Informasi dan SAP Pada Laporan Keuangan Di Moderasi Kapasitas SDM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1259-1270.

- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62-79.
- Ersanti, N. A., & Azlina, N. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Pelalawan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), 139-157.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(2).
- Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Krisandi, Y., & Sayekti, F. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing. E-ISSN*, 2746-9956.
- Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 51-63.
- Lumuly, E., & Atarwaman, R. J. (2024). Pengaruh Implementasi Dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Ambon (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kota Ambon). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(02), 147-159.
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 7-21.
- Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2), 181-197.
- Pemerintah Ri. (2019). *Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pramudita, I. D., Julianti, M., Putri, R. E., Ananda, S., & Rodiah, S. (2024). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 7(1), 1-9.
- Qur'aini, A. R., Wahyuningtyas, V., & Kustiwi, I. A. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Partisipasi Manajemen Pada Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(1), 29-38.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Susanto, A. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya Publishing.
- Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64-77.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 3 (2026) 1173 – 1185 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i3.10634

- Wartini, N. N., & Yasa, I. G. W. M. (2016). Analisis efektivitas sistem informasi keuangan daerah (sikd) pemerintah kabupaten jembrana. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 165322.
- Yulianda, D., Lubis, N. K., & Azhar, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi Dan Implementasi Sipd Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)*, 3(2), 794-804.
- Yulianti, V., Wulandari, D. S., & Sopiah, S. (2023). Analisis Stabilitas Keuangan dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Pendekatan Teori Keagenan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 519-528.